

# PELAKSANAAN PERATURAN BUPATI TANAH DATAR NOMOR 21 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN NAGARI PANYALAIAN KECAMATAN X KOTO KABUPATEN TANAH DATAR

Prima Herdian<sup>1</sup>, Sanidjar Pebrihariati R<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum<sup>1</sup>, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: [primaherdian99@gmail.com](mailto:primaherdian99@gmail.com)

## ABSTRACT

State budget management plays an important role in the success of regional development. Objective To analyze the implementation, constraints, and efforts in implementing the Nagari Panyalaian Revenue and Expenditure Budget, X Koto District, Tanah Datar Regency 2020. Types of Sociological Juridical research. Data collection techniques through interviews. Data were analyzed qualitatively. The results of the study: 1) The administration of the Nagari Budget is the authority of the Wali Nagari as the leader of the government in Nagari. 2) APBNagari funds that depend on funds from the Central Government and Regional Governments will disrupt the process of implementing APBNagari. 3) Improving the administrative structure, paying more attention to the estimated funds to be managed by the nagari.

**Keywords: Budget, Nagari, Income, Expenditure.**

---

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pengelolaan anggaran nagari merupakan landasan penting karena kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintah nagari serta pihak-pihak yang terkait secara jelas diatur dalam Undang-Undang dan peraturan. Pengelolaan anggaran yang diteruskan dari pusat ke kabupaten dan yang di Nagari nantinya akan dikelola sebagaimana mestinya akan dikelola dengan baik. Oleh karena itu, pengelolaan anggaran negara memegang peranan penting dalam menyukseskan pembangunan daerah.

Hal ini juga berlaku bagi Nagari Panyalaian yang pengelolaan keuangan Nagari adalah langkah utama pemerintah Nagari dalam melaksanakan pembangunan, baik itu pembangunan pertanian, peternakan, program bantuan modal usaha mikro atau pembangunan fasilitas umum dukungan yang dibutuhkan masyarakat nagari. Namun

Pelaksanaan pengelolaan anggaran negara seringkali menjadi kendala mencapai tujuan APBN itu sendiri.

Berdasarkan APBD Pendapatan Nagari Panyalaian Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar yang di temukan bahwa APBNagari tahun 2020 hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan pemerintah daerah Nagari itu saja, dengan melihat jelas kepentingan masyarakat dan pembangunan masing-masing wilayah Nagari. Upaya masih terkendala anggaran, sehingga pemerintah Nagari tidak bisa berbuat banyak. Selain itu, beberapa anggaran Nagari tidak digunakan dengan baik dalam APBN yang ada, Anggaran Harus ditugaskan untuk kegiatan yang dialihkan ke kegiatan yang lebih mendesak yang tidak tercantum dalam anggaran.

### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang dan permasalahan, maka rumusan masalah dalam penulisan ini adalah :

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Panyalaian Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar Tahun 2020?
2. Apa Sajakah Kendala-Kendala Yang Dihadapi Oleh Wali Nagari Dalam Melaksanakan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Nagari Panyalaian Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar Tahun 2020 ?
3. Bagaimanakah Upaya-Upaya Yang Dilakukan Wali Nagari Dalam Melaksanakan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Nagari Panyalaian Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar Tahun 2020 ?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisa pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Panyalaian Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar Tahun 2020
2. Untuk menganalisa Kendala-Kendala yang ditemui dalam melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Panyalaian Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar Tahun 2020
3. Untuk menganalisa Upaya-Upaya yang dilakukan Pemerintah Nagari dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Panyalaian Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar Tahun 2020

## **II. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan jenis yuridis sosiologis untuk mencari data primer. Penelitian yuridis sosiologis adalah penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya. Disamping itu juga akan dilakukan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder<sup>1</sup>

## **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Nagari Panyalaian Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar Tahun 2020**

Penyelenggaraan Anggaran Nagari merupakan kewenangan dari Wali Nagari sebagaimana pemimpin dari pemerintahan di Nagari. Melalui kewenangan tersebut Wali Nagari dapat menitikan wewenangnya tersebut kepada Sekretaris Nagari, baik itu dalam pengelolaan anggaran maupun dalam rencana melaksanakan urusan pemerintahan lainnya, namun kewajiban penuh tetap berada pada Wali Nagari, dimana Sekretaris Nagari bertanggung jawab kepada Wali Nagari. Dalam rancangan menjalankan roda pemerintahan Nagari Panyalaian pada bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, dan didukung dengan adanya susunan pemerintahan yang terdiri dari wali nagari, sekretaris nagari dan perangkat nagari lainnya, yang keseluruhan saling berkoordinasi dan berpartisipasi dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

### **B. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Wali Nagari dalam melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Panyalaian Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar Tahun 2020**

Dalam menjalankan rancangan APBNagari tentu tidak selalu berjalan dengan mulus, adanya kendala-kendala yang dihadapi oleh pemerintah setempat, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Roni Dt. Panduko Sirajo selaku Wali Nagari Panyalaian, kendala-kendala yang dihadapi oleh Nagari Panyalaian yaitu :

1. Kendala penerimaan dana nagari yang terbatas  
 Dalam menjalankan APBNagari dengan penerimaan nagari yang terbatas maka perlu bergantung pada bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten
2. Kendala anggaran yang terlambat turun

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto, 2013, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 24

Dana APBNagari yang bergantung pada dana Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah akan mengganggu proses pelaksanaan APBNagari, apabila dana anggaran turun maka nagari hanya dapat mengandalkan Sisa lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) pada tahun sebelumnya guna mengejar pelaksanaan kegiatan Pemerintah Nagari agar kegiatan dapat diselesaikan tepat waktu. Alasan lain terlambatnya anggaran turun yang mengganggu pelaksanaan APBNagari Panyalaian adalah Nagari belum atau terlambat menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, yang mana iui termasuk sebagai persyaratan untuk menyalurkan dana APBNagari tersebut

3. Kurangnya transparansi dana APBNagari

Anggaran dana yang kurang transparan membuat kepercayaan masyarakat menjadi berkurang dan kurangnya akses masyarakat dalam meninjau dan mengontrol tentang penerimaan dan pengeluaran dana APBNagari, yang mana masyarakat itu sendiri memiliki hak untuk mengetahui perihal rincian dana APBNagari tersebut.

**C. Upaya-upaya yang dilakukan Wali Nagari dalam melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Panyalaian Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar Tahun 2020**

Upaya yang dilakukan pihak Nagari Panyalaian dalam pelaksanaan APBNagari yaitu :

1. Memperbaiki struktur administrasi yang berantakan pada periode sebelumnya yang menyebabkan perangkat nagari setelahnya menjadi kesulitan dalam memperbaiki struktur tersebut.
2. Lebih memperhatikan perkiraan dana yang dibutuhkan agar tidak terjadinya kekurangan dana anggaran nagari. Dan lebih memilah mana kegiatan yang penting dan bermanfaat untuk diselenggarakan dan mana yang tidak bermanfaat agar tidak terjadinya

pemborosan dana anggaran yang terbuang sia-sia.

3. Memaksimalkan kembali potensi pendapatan nagari guna untuk menambah pendapatan nagari terutama dibidang ekonomi, serta mengoptimalkan potensi nagari agar memikat para perantau untuk menyumbangkan dana guna membangun nagari.
4. Menciptakan pemerintahan yang adil, jujur serta transparan dalam menjalankan pelaksanaan rancangan kegiatan nagari, sehingga terciptanya kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Nagari setempat. Masyarakat bisa ikut mengontrol bagaimana rincian dana anggaran yang masuk dan keluar, agar terciptanya transparansi dana yang ada.

#### **IV. SIMPULAN DAN SARAN**

##### **A. Simpulan**

1. Pelaksanaan APBNagari Panyalaian sudah sesuai dengan Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 21 Tahun 2020, dapat dilihat dari dana anggaran pendapatan nagari dengan yang direalisasikan tidak mengalami defisit, sehingga Nagari tidak kesulitan untuk mencari dana untuk menutupi kekurangan dana yang digunakan untuk menjalankan rancangan APBNagari yang telah dirancang sebelumnya
2. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Nagari Panyalaian adalah
  - a. penerimaan Nagari yang terbatas karena hanya berasal dari bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten tidak mencukupi kebutuhan nagari.
  - b. Anggaran yang diturunkan dalam APBNagari mengalami keterlambatan, sehingga menjadi penghambat pelaksanaan.
  - c. Belanja/ pengeluaran Nagari yang diperuntukkan untuk penyelenggaraan pemerintahan nagari, penyelenggaraan pembangunan nagari, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu,

juga dikarenakan kurangnya keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan anggaran dan Tidak adanya transparansi dalam pelaksanaan APBNagari.

3. Upaya-upaya yang dilakukan Wali Nagari dalam melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Panyalaian Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar Tahun 2020
  - a. memperbaiki administrasi untuk dapat memilah mana kegiatan yang penting untuk diselenggarakan dan mana yang tidak penting untuk diselenggarakan guna untuk menghindari pemborosan dana anggaran yang terbuang dengan sia-sia.
  - b. meningkatkan potensi ekonomi Nagari Panyalaian guna meningkatkan pendapatan nagari dengan meningkatkan potensi nagari diharapkan bisa memikat para perantau nagari untuk dapat menyumbangkan dana guna meningkatkan atau mensejahterakan Nagari Panyalaian.
  - c. menciptakan pemerintahan yang adil, jujur, dan transparan guna memudahkan masyarakat untuk ikut andil dalam mengontrol dana anggaran yang digunakan oleh nagari.

## **B. Saran**

1. Agar ditingkatkanya kualitas perangkat nagari dalam melaksanakan tugas-tugasnya terutama terkait pelaksanaan APBN Nagari termasuk didalamnya

perencanaan kegiatan yang akan dilaksanakan serta ketersediaan dana yang dimiliki oleh Nagari Panyalaian X Koto Kabupaten Tanah Datar.

2. Agar pemerintahan nagari lebih memaksimalkan masyarakat dalam proses pengawasan anggaran selain adanya BAMUS, sekaligus juga berkenaan dengan transparansi anggaran dalam pelaksanaan APBNagari kepada masyarakat nagari.
3. Agar pemerintahan nagari harus bisa memanfaatkan sumber pendapatan keuangan nagari sesuai dengan Peraturan Daerah Bupati Tanah Datar Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari Panyalaian Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar untuk menambah keuangan nagari

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

Soerjono Soekamto, 2013, Penelitian Hukum Normatif, Raja Grafindo Persada, Jakarta

## **UCAPAN TERIMAKASIH**

Peneliti mengucapkan terimakasih kepada Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H. selaku pembimbing penulis yang sudah memberikan waktu dan arahnya dalam menyelesaikan skripsi dengan baik juga kepada para berbagai pihak yang memberikan bantuan dalam melakukan penyelesaian skripsi ini.